

PERANAN KELUARGA HATOYAMA DALAM
PEMERINTAHAN JEPANG SERTA GAYA KEPEMIMPINAN
YUKIO HATOYAMA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra



RASYIQAH ANGGRHINEZ

08110024

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rasyiqah Anggrhinez

NIM : 08110024

Tanda tangan : 

Tanggal : 25 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari

Pembimbing : Susy Ong, Ph.D

Pembaca : Erni Puspitasari, M.Pd

Ketua Penguji : Syamsul Bachri, M.Si

Disahkan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012

Ketua Program Studi,



Hari Setiawan, M.A

Dekan,



Syamsul Bachri, M.Si

FAKULTAS SAS TRA

Bismillahirrahmanirrahim,

*Dengan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini kepada Mama,
Papa dan Inoue yang selalu mendrakan, mendukung dengan
sepenuh hati selama proses pembuatan skripsi ini dari nol hingga sekarang.*

Love you

Zaka ♥

KATA PENGANTAR

Subhanallah, Walhamdulillah

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra Program Studi Sastra Jepang pada Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Susy Ong Ph.D, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan serta mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Erni Puspitasari, MPd, selaku pembaca skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membaca tulisan ini dan memberikan saran serta kritik yang sangat berguna untuk saya.
3. Bapak Syamsul Bachri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Sastra
4. Bapak Hari Setiawan, M.A selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang
5. Para Dosen Universitas Darma Persada yang telah banyak memberikan ilmunya yang sangat berguna, khususnya Ibu Sari Kartika, S.S selaku Dosen PA yang selalu mendukung saya untuk segera merampungkan skripsi ini.
6. Segenap seluruh karyawan Universitas Darma Persada (Uda Buyung), terutama Kesekretariatan Fakultas Sastra (Uda Armel) dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dari awal masuk kuliah sampai penyusunan skripsi ini selesai.

7. Mama tercinta yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan dukungan tanpa mengenal lelah. Skripsi ini Kaka persembahkan dengan seluruh kasih sayang untuk Mama. Love you Mom:*
8. Papa tersayang yang tiada hentinya mendukung Kaka. Love you Dad:*
9. Adik kebangganku, terimakasih atas waktu yang diberikan untuk Kaka, semoga Inoue bisa terus melangkah, love you my Brother :*
10. Keluarga besar Teuku Umar Marzuki, yang telah memberikan dukungan baik moral dan ataupun material.
11. MEGANE(sahabat seperjuangan), untuk Buyung, Lisa, Dika Adhi, Cheppi, Putu, Vika, Wina, Adit, Berto, Arry, Anggih, Surya. Kampus tidak menyenangkan tanpa kalian. Semoga impian kita semua tercapai.
12. Laras, Rizka, Puspa sahabat-sahabat nge-bolang yang selalu memberikan semangat ^^
13. Skripsilah yang membuat kami lebih dekat, Renya, Ai, Oje, Aul, Aya, Geza, selamat akhirnya kita sudah bergelar ☺
14. Teman perantauan yang tak kenal lelah Dyna, Rian, Ragil, Ka Dilla “Hei kita bisa sidang loh” 2 bulan menjelang sidang tidak akan terlupakan.
15. Yasuko Morita sensei (ACIKITA). Sensei selalu mensupport saya terimakasih, bertemu Sensei saya mendapatkan banyak pengetahuan.
16. Yasuhiro-San wartawan dari Jakarta Shinbun yang sudah membantu dalam mendapatkan data kampanye dan kabinet Yukio Hatoyama.
17. Seluruh teman – teman angkatan 2008 yang selalu saling memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini,
18. BEM periode 2011, Aji, Chiput, Ka Deri, Otong, Mike, Ira, Bai
19. Ka Ijul dan ka Silva yang telah saya repotkan untuk mencari, membeli, dan membawa buku pegangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat.
20. Mas Rus dan kawan-kawan yang selalu mendahulukan saya untuk print, foto copy. Tempat foto copy paling menyenangkan.
21. Teman – teman account twitter yang selalu memberikan dukungan dikala matahari sudah terbenam.

22. Bapak - bapak security kampus yang selalu menanyakan “Kapan Nez kamu sidang”, membuat saya selalu termotivasi.
23. Teman - teman Tae Kwon Do yang selalu memberikan semangat.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, Untuk itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Rasyiqah Anggrhinez



ABSTRAKSI

NAMA : Rasyiqah Anggrhinez
JURUSAN : Sastra Jepang
JUDUL SKRIPSI : Peranan Keluarga Hatoyama Dalam Pemerintahan Jepang
Serta Gaya Kepemimpinan Yukio Hatoyama

Setiap Negara membutuhkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Keluarga Hatoyama membuktikan bahwa selama 4 generasi berturut – turut keluarga Hatoyama bisa menjadi bagian dari pemerintahan Jepang. Seperti Perdana Menteri dan Menteri. Sebuah fenomena yang jarang terjadi di dalam sejarah dunia.

Sebagai generasi ke-empat Yukio melanjutkan perjuangan Kazuo, Ichiro, dan Iichiro dengan membawa perdamaian, kesejahteraan, dan stabilitas masyarakat Jepang menuju perubahan dan mendirikan partai politik yang akhirnya membawa Yukio untuk menempati jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang.

Keyword : Pemimpin, Keluarga Hatoyama, Pemerintahan Jepang.

がいよう
概要

なまえ
名前

: ラシカーアングリネズ

せんこう
専攻

にほんぶんがく
: 日本文学

ろんぶんたいとる
論文タイトル

: 日本政治で鳩山家の役割を握る、そして鳩山由紀夫
のリーダー様式

どの時代もどの国も指導者を要している。日本の鳩山家はこれまで四代にわたり、日本国家をリードする指導者、総理大臣及び大臣を輩出（はくしゅつ）した。これは世界史の中でも稀な現象である。

鳩山和夫、一郎、威一郎に続き、四代目の由紀夫は平和・繁栄・安定の日本社会に変化をもたらすと、新しい政壇結成し、ついに44年ぶりに政権交代を果たし、日本の総理大臣に就任した。

キーワード: 指導者, 鳩山家, 日本政治。

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Peumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Landasan Teori.....	6
1.7 Metode Penelitian	11
1.8 Manfaat Penelitian	11
1.9 Sistematika Penulisan.....	11

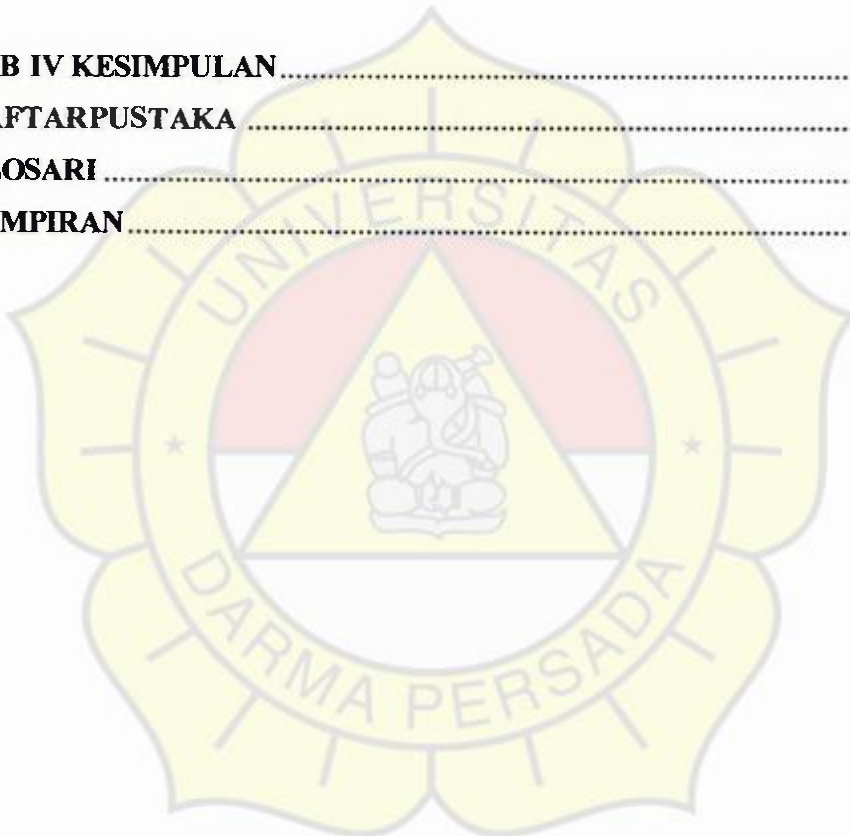
BAB II PERANAN POLITIK KELUARGA HATOYAMA

2.1 Generasi Pertama Kazuo Hatoyama.....	14
2.1.1 Pernikahan dengan Taga Haruko.....	16
2.1.2 Mengesahkan Status Pengacara.....	18
2.1.3 Mendirikan Perguruan Tinggi Swasta.....	18
2.1.4 Melembagakan Konstitusional Pemerintah.....	19
2.2 Generasi Kedua Ichiro Hatoyama.....	21
2.2.1 Pembentukan Partai Demokrat Liberal Jepang.....	23
2.2.2 Periode Kepemimpinan Presiden Hatoyama.....	25
2.3 Generasi Ketiga Iichiro Hatoyama.....	26

BAB III GAYA KEPEMIMPINAN YUKIO HATOYAMA

3.1 Riwayat Hidup Yukio Hatoyama.....	30
3.2 Perjalanan Karir Politik Yukio Hatoyama.....	31
3.2.1 Konsep Yuai dan Pembentukan DPJ.....	32
3.2.2 Terpilih Sebagai Perdana Menteri.....	35
3.2.2.1 Kabinet dan Misi Yukio Hatoyama.....	38
3.2.3 Pengunduran Diri Yukio Hatoyama.....	45
3.3 Gaya Kepemimpinan Yukio Hatoyama.....	47
3.4 Keistimewaan Yukio Hatoyama.....	48

BAB IV KESIMPULAN.....	50
DAFTARPUSTAKA	52
GLOSARI	54
LAMPIRAN.....	56

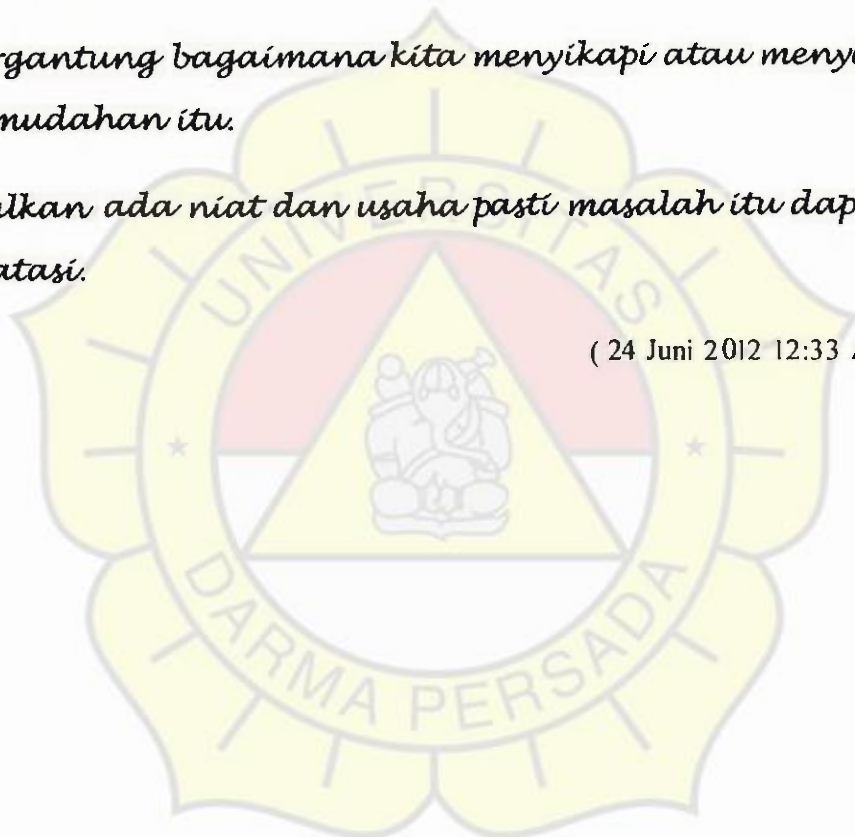


Sesulit apapun masalah yang dihadapi, pasti terselip sebuah kemudahan.

Tergantung bagaimana kita menyikapi atau menyadari kemudahan itu.

Asalkan ada niat dan usaha pasti masalah itu dapat diatasi.

(24 Juni 2012 12:33 A.M)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Terbentuknya negara Jepang modern pada zaman Meiji, ialah sebagai akibat menangnya pemikiran tradisional yang berpusat pada studi Nasional, dengan dikembalikannya kekuasaan politik tertinggi kepada Kaisar. Walaupun institusi politik, hukum, konstitusi meniru model negara-negara maju Eropa. Hukum pemerintahan Meiji yang baru sangat dipengaruhi oleh teori hukum Eropa, khususnya liberal Prancis tentang hak-hak rakyat. Pemerintahan Meiji juga terobsesi untuk memulihkan hukum-hukum kuno Jepang

Kemudian pada tahun 1889 Undang-Undang Dasar Meiji disahkan dan Parlemen Kekaisaran bersidang untuk pertama kalinya dalam tahun 1890. pada tahun 1899 dibuat revisi perjanjian Internasional dengan negara-negara Barat, yang menempatkan Jepang sejajar dengan negara-negara Barat. Era ini ditandai dengan tumbuhnya kapitalisme dan tersebar luasnya paham demokrasi.

Kekalahan Jepang dalam perang dunia II, mengakhiri militerisme dan Fasisme Jepang, disusul dengan pendemokrasian oleh pendudukan sekutu, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Sebagai simbol demokrasi, munculah Undang-Undang Dasar Negara Jepang tahun 1947. sejak itu, mulailah berlaku institusi politik modern Amerika disebut dengan konstitusi Jepang.

Kabinet-kabinet partai politik, terutama Partai Liberal Jepang yang terbentuk tahun 1955, merupakan tulang punggung pelaksanaan mekanisme demokrasi sistem parlementer. Pertarungan partai-partai yang ada di Jepang merupakan bukti nyata terjadinya demokrasi di Jepang.

A. Sistem Politik Jepang

Perdana Menteri Jepang secara kelembagaan merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan politik dalam dan luar negeri, tetapi konstitusi Jepang menetapkan bahwa kekuasaan Eksekutif ada di tangan kabinet dan bukan di tangan Perdana Menteri. Hal ini berarti bahwa penyelenggara atau pelaksana pemerintahan di Jepang adalah kabinet dan bukannya Perdana Menteri. Kabinet yang secara kolektif harus bertanggungjawab kepada parlemen (Diet).

Selaku kepala eksekutif Perdana Menteri kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan politiknya, tetapi sebagai tokoh kepala pemerintahan ia mempunyai peran yang sangat menentukan dalam menangani berbagai percaturan politik di dalam negeri maupun interaksinya dengan politik luar negeri. Tidak ada aktor politik lain selain seorang perdana menteri yang memiliki kemampuan mobilisasi berbagai kementerian dan lembaga Negara untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional Jepang.

Menurut Budiarjo, Perdana Menteri adalah Badan Eksekutif. Badan Eksekutif terdiri dari kepala Negara seperti Raja atau Presiden, beserta menteri-menterinya. Perdana Menteri bertugas melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang telah ditetapkan badan legislatif serta menyelenggarakan Undang – Undang yang dibuat oleh legislatif. (1977:79)

Di Jepang menganut sistem parlementer sehingga kabinet dipimpin langsung oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dilantik oleh kaisar setelah dipilih oleh parlemen Jepang. Perdana Menteri sebagai ketua kabinet bertugas untuk melantik dan memberhentikan para menteri.

Menurut Mangadaram, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen (Diet) dan Perdana Menteri sendiri adalah anggota parlemen (Diet). Perdana Menteri adalah seseorang yang mengepalai sebuah kabinet dalam sebuah Negara dengan sistem parlementer. Perdana Menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya. (1979:159)

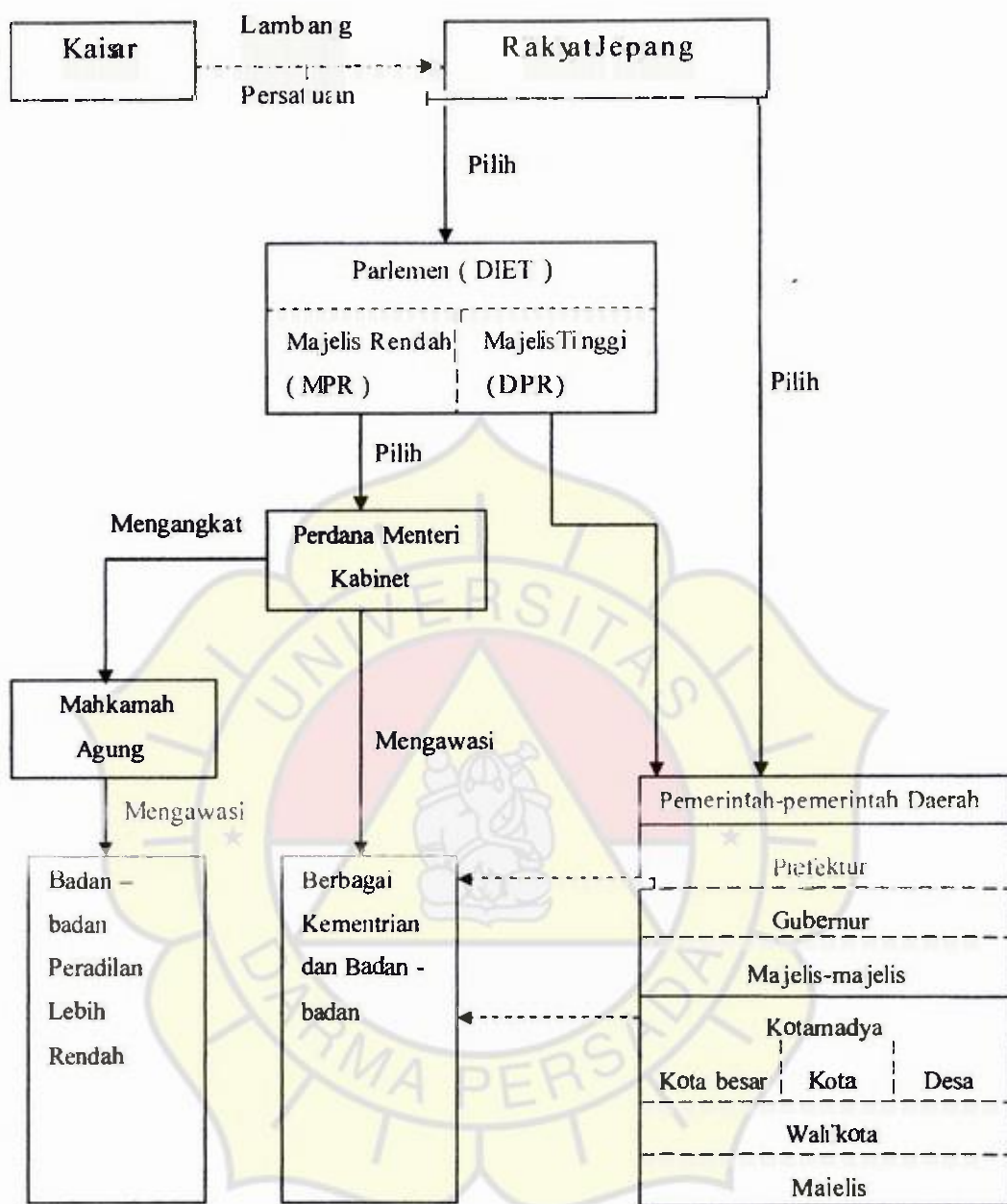
Menurut Budiarjo (1977:187-188), Perdana Menteri sebagai pemimpin Negara memiliki kekuasaan sebagai berikut :

- Diplomatik : Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara – Negara lain.
- Administratif : Melaksanakan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi Negara.
- Militer : Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan Negara.
- Yudikatif : Amnesti.
- Legislatif : Merencanakan rancangan Undang-Undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi Undang – Undang.

Mengenai sistem politiknya, Perdana Menteri Jepang mengepalai sebuah kabinet, dan sekaligus memimpin partai mayoritas di Majelis Rendah (*Shugin*), dan secara kolektif bertanggungjawab kepada parlemen yang disebut (*Diet/Kokkai*). Perdana menteri dan kabinetnya harus meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari majelis rendah.

Parlemen Jepang terdiri dari dua badan pemerintahan, yaitu Majelis Rendah (*Shugin*) dan Majelis Tinggi (*Sangiin*). Majelis Tinggi terdiri dari wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang, sebelum Perang Dunia Kedua badan ini hanya diisi oleh kaum bangsawan. Majelis ini berhak menanggukkan berlakunya suatu undang-undang.

Majelis Rendah memegang kekuasaan legislatif. Anggotanya dipilih setiap empat tahun sekali, kecuali apabila dibubarkan lebih awal dari masa yang telah ditentukan. Kekuasaan yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan peradilan yang didirikan berdasarkan undang-undang.



Gambar 1.1 Struktur Pemerintahan Jepang

Sumber : Mas'ood Mohtar. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY, 2008

B. Reformasi Politik Jepang

Perpolitikan Jepang akhirnya menorehkan sejarah baru. Pada pemilu Majelis Rendah (*shuugiin*) di bulan Agustus 2009 lalu, Partai Demokrat Jepang yang merupakan partai oposisi utama berhasil mengalahkan Partai Demokrat Liberal Jepang setelah sebelumnya Partai Demokrat Liberal Jepang mendominasi perpolitikan negeri matahari terbit itu selama lebih dari 50 tahun.

Dengan demikian, Partai yang didirikan oleh Yukio Hatoyama itu (Partai Demokrat Jepang) bertukar posisi dengan Partai Demokrat Liberal Jepang untuk menempatkan diri sebagai partai pemerintah, dan berhak menyusun kabinet pemerintahan yang baru. Hasil ini sekaligus mengukuhkan posisi Partai Demokrat Jepang di parlemen, karena mereka juga telah berhasil menguasai mayoritas Majelis Tinggi (*sangiin*) di parlemen Jepang saat itu.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis mengidentifikasi masalah yang menitikberatkan pada profil dan gaya kepemimpinan Yukio Hatoyama sebagai Perdana Menteri Jepang ke – 74.

1.3 PEMBATAAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk membahas tentang keluarga besar Hatoyama dalam memimpin kancah politik di Jepang tanpa pembahasan lebih rinci. Untuk lebih memahami dan memperdalam pemahaman tentang Keluarga Hatoyama, maka penulis membatasi permasalahan dengan hanya memusatkan pada gaya kepemimpinan Yukio Hatoyama selaku Perdana Menteri Jepang pada 16 September 2009–8 Juni 2010 dan pendiri Partai Demokrat Jepang.

1.4 PERUMUSAN MASALAH

Menurut identifikasi masalah yang telah disebutkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana keluarga Hatoyama bisa menempati porsi yang signifikan dalam parlemen Jepang, dalam garis keturunan langsung selama empat generasi berturut-turut.
- b) Implementasi kata *yui* yang diterapkan Yukio Hatoyama untuk mendirikan Partai Demokrasi Jepang sehingga bisa menempati posisi partai terbesar kedua di Jepang.
- c) Faktor apa saja yang menyebabkan Yukio Hatoyama mundur sebagai Perdana Menteri.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Sebagian masyarakat hanya menganalisis kelembagaan suatu Negara dan melupakan peran individu yang berada di belakangnya, oleh karena itu penulis mengambil tema tersebut dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana cara keluarga Hatoyama bisa menempati porsi yang signifikan dalam parlemen Jepang selama empat generasi berturut – turut, lalu mengenai kata *yui* yang diterapkan oleh Yukio Hatoyama dalam Partai Demokrat Jepang serta faktor apa yang menyebabkan Yukio Hatoyama mundur sebagai Perdana Menteri.

1.6 LANDASAN TEORI

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulisan skripsi ini menggunakan konsep Keluarga, Pemerintahan serta Gaya Kepemimpinan yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1.6.1 Keluarga

Dalam buku *Ensiklopedi Umum* keluarga dapat diartikan dengan,

Kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang – orang yang termasuk keluarga ialah ibu, bapak, dan anak – anaknya. Sekelompok orang ini (ibu, bapak, dan anak – anak mereka) disebut keluarga nuklir atau *keluarga inti*. Sedangkan *keluarga luas*, merupakan kelompok kekerabatan yang terdiri dari tiga atau empat *keluarga inti* yang terikat oleh hubungan orang tua anak atau saudara – saudara kandung dan oleh satu tempat tinggal bersama yang besar. (Yayasan Kanisius, 1981 : 644-645)

Berbeda dengan Suparlan dalam buku *Keluarga dan Kekerabatan*, ia berpendapat :

“Para ahli antropologi melihat keluarga sebagai suatu satuan sosial terkecil yang dipunyai oleh manusia sebagai mahluk sosial. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa sebuah keluarga adalah satu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik anak, dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang – orang tua mereka yang telah jompo”. (Suparlan, 1981)

Suatu keluarga inti dapat menjadi suatu keluarga luas dengan adanya tambahan dari sejumlah orang lain, baik yang sekerabat maupun yang tidak sekerabat, yang secara bersama – sama hidup dalam satu rumah tangga dengan keluarga inti.

Oleh karena itu, bentuk yang paling dasar dalam sebuah keluarga ialah terdiri atas seorang laki – laki dan seorang perempuan yang disatukan dalam pernikahan dan mempunyai keturunan untuk meneruskan garis keturunannya. Adapun orang luar atau orang lain yang akan masuk dalam lingkup *keluarga inti* ialah untuk mewujudkan *keluarga luas*.

1.6.2 Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000: 13).

Sementara itu pemerintahan mempunyai 2 arti, yaitu Pemerintah dalam *arti luas* dan *arti sempit*.

Pemerintahan dalam *arti luas* :

Menurut Van Poeljoe (1966) pemerintahan dalam arti luas ialah sebagai fungsi yakni meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat – alat Pemerintahan untuk mencapai tujuan Pemerintah.

Pemerintahan dalam *arti sempit* :

Van Poeljoe (1966) Mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti sempit ialah, sebagai badan pelengkap Negara yang disertai perintah.

Kemudian Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. (2000:70)

Kaufman mengungkapkan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (1995:101)

1.6.3 Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan – keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari hal itulah timbul pemikiran dan kebutuhan untuk dipimpin dan memimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias (David, Keith, 1985). Menurut Rivai dalam buku *Kepemimpinan dan Dua*.

1) Kepemimpinan adalah Sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk seseorang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela.

2) Kepemimpinan adalah Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas – aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. (Rivai, 1999: 23)

Sedangkan menurut Bennis, dalam buku *Reinventing Leadership*, Kepemimpinan ialah:

Saya pikir seorang presiden besar, seperti pemimpin besar mana pun juga lainnya, paling sedikit harus mempunyai tiga hal. Pertama, rangkaian keyakinan yang kuat. Kedua, peserta yang penuh pengabdian. Ketiga, kemampuan menggunakan kedudukannya sebagai mimbar untuk mendapatkan dukungan luas bagi tujuannya. Semua kriteria ini adalah apa yang diperlukan pemimpin di tingkat nasional, dan wawasan ini adalah diperlukan organisasi di tingkat nasional. (Bennis, 2009: 56)

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Newstrom yang menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan (1995). Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu (Husnan, 2002:224).

Sedangkan menurut Tjiptono (2001:161), gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004:29).

Menurut Tanjung, (2003 : 35-36) mengemukakan empat (4) gaya kepemimpinan yang lazim digunakan, antara lain :

1. Kepemimpinan Demokrasi, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada kemampuan untuk menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
2. Kepemimpinan Mutlak, yakni suatu gaya kepemimpinan yang menitikberatkan kepada kesanggupan untuk memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan pengikut untuk kepentingan pribadi dan golongannya dengan kesediaan menanggung segala resiko apapun.
3. Kepemimpinan Paternalisme, yakni bentuk gaya kepemimpinan pertama (demokrasi) dan kedua (diktator) diatas. yang dapat diibaratkan dengan sistem diktator yang berselimutkan demokratis.
4. Kepemimpinan Bebas Terkendali, yakni gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditentukan oleh atasan mereka.

Dikemukakan bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. (Blanchard,1992)

1.7 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui kajian pustaka. Studi pustaka yang digunakan ialah menelaah berbagai buku, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan Keluarga Hatoyama, baik berupa buku fisik ataupun buku elektronik (eBook). Sebagian besar bahan yang digunakan, penulis dapatkan dari perpustakaan Universitas Darma Persada dan Internet.

1.8 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- 1) Sebagai bahan pengetahuan bagi khalayak umum.
- 2) Menambah wawasan mahasiswa Sastra terutama jurusan Jepang yang akan mengambil tema skripsi tentang politik atau pemimpin Jepang.
- 3) Untuk menerapkan hasil studi yang selama ini sudah dipelajari.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab sebagaimana berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

- Perkembangan politik Jepang

BAB II : PERANAN POLITIK KELUARGA HATOYAMA

- Generasi pertama Kazuo Hatoyama
- Generasi kedua Ichiro Hatoyama
- Generasi ketiga Ichiro Hatoyama

BAB III : GAYA KEPEMIMPINAN YUKIO HATOYAMA

- Riwayat hidup Yukio Hatoyama
- Perjalanan karir politik Yukio Hatoyama
- Gaya Kepemimpinan Yukio Hatoyama
- Keistimewaan Yukio Hatoyama

BAB IV : KESIMPULAN